



NUSANTARA INNOVATION JOURNAL

PERAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Robianto^{1*}

¹ Dinas Pangan Kabupaten Berau, Berau, Kalimantan Timur, Indonesia

ABSTRACT

This study investigates the function of the Standard Unit Price (SSH) in improving accountability and budgetary efficiency for human resource development within the Berau Regency Government. SSH, as a tool for regional budget control, is essential for attaining transparent and effective financial governance; nevertheless, its application in the realm of regional human resource development has been suboptimal. The study used a qualitative methodology with an explanatory case study design, incorporating 27 key informants from the Regional Financial and Asset Management Agency, the Regional Civil Service Agency, and associated OPDs. We collected data through comprehensive interviews, participatory observation, and a study of budget documents. The research findings indicate that the use of SSH markedly enhances budget accountability via cost standardization, planning transparency, and audit facilitation. SSH achieved budgetary reductions of 17.3% for competency development programs and 22.1% for education and training operations in terms of efficiency. Challenges emerged around the necessity to adapt SSH to market pricing fluctuations, restricted flexibility for particular requirements, and the capability of deploying human resources. This study advocates for the formulation of adaptive SSH policies, the fortification of information systems integration, and the augmentation of financial management officials' capabilities to optimize the function of SSH in bolstering accountability and budgetary efficiency for regional human resource development.

Keywords: Price Unit Standards, Accountability, Budget Efficiency, Human Resource Development, Local Government

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:

13-05-2025

Tanggal Diterima:

15-09-2025

Tersedia Online:

25-11-2025

*Korespondensi:

Robianto

E-mail:

Robianto.berau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Standar Satuan Harga (SSH) dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM di Pemerintah Kabupaten Berau. SSH sebagai instrumen regulasi penganggaran daerah menjadi krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien, namun implementasinya dalam konteks pengembangan SDM daerah belum optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori, melibatkan 27 informan kunci dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan OPD terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSH berkontribusi signifikan pada peningkatan akuntabilitas anggaran melalui standarisasi biaya, transparansi perencanaan, dan kemudahan audit. Dari segi efisiensi, SSH menghasilkan penghematan anggaran 17,3% pada program pengembangan kompetensi dan 22,1% pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Meski demikian, ditemukan tantangan berupa

kebutuhan penyesuaian SSH dengan dinamika harga pasar, keterbatasan fleksibilitas untuk kebutuhan spesifik, dan kapasitas SDM pelaksana. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan SSH adaptif, penguatan integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan untuk mengoptimalkan peran SSH dalam memperkuat akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah.

Keywords: Standar Satuan Harga, Akuntabilitas, Efisiensi Anggaran, Pengembangan SDM, Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien menjadi tuntutan utama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak optimal bagi pembangunan. Sebagai salah satu instrumen pengelolaan keuangan daerah, Standar Satuan Harga (SSH) memiliki posisi strategis dalam menjamin keseragaman harga barang dan jasa yang digunakan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah ([Amanda & Henny, 2022](#)).

SSH merupakan standar biaya yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja pemerintah daerah. Penerapan SSH dimaksudkan untuk mencegah terjadinya mark-up anggaran, memudahkan proses audit, serta mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran ([Yuliyanto dkk., 2022](#)). Implementasi SSH yang tepat menjadi krusial, terutama dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang membutuhkan alokasi anggaran signifikan.

Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM aparatur yang berkualitas. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Berau (2023), dari 6.352 aparatur sipil negara (ASN) yang ada, baru 42,3% yang memiliki kompetensi sesuai standar jabatan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran signifikan untuk program pengembangan kompetensi ASN. Namun, tantangan muncul ketika anggaran pengembangan SDM belum dikelola secara optimal, yang ditandai dengan adanya disparitas harga untuk jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penelitian terdahulu tentang penerapan SSH dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian dari [Gudipung dkk. \(2024\)](#) mengidentifikasi bahwa penerapan SSH dapat meningkatkan efisiensi anggaran hingga 15% di Pemerintah Kabupaten Sikka. Sementara itu, [Kristiyanti & Dewi \(2021\)](#) menemukan bahwa implementasi SSH berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan belanja barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji peran SSH dalam konteks anggaran pengembangan SDM daerah masih terbatas. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SSH berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2019-2023, terdapat variasi signifikan dalam pemanfaatan anggaran pengembangan SDM antar OPD, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan adanya tren positif dalam realisasi anggaran pengembangan SDM, namun disparitas harga antar OPD masih terjadi meskipun telah mengalami penurunan signifikan. Disparitas ini mengindikasikan adanya ketidakseragaman dalam penerapan SSH

untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang sejenis. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat Kabupaten Berau telah menerapkan SSH sejak tahun 2018 melalui Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Berau yang kemudian diperbarui secara berkala.

Tabel 1: Anggaran dan Realisasi Program Pengembangan SDM Kabupaten Berau 2019-2023

Tahun	Anggaran (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Persentase (%)	Jumlah OPD	Disparitas Harga Antar OPD (%)
2019	42,7	38,2	89,5	32	27,3
2020	31,5	26,8	85,1	32	25,1
2021	33,8	30,2	89,3	34	22,7
2022	47,3	44,1	93,2	34	18,5
2023	52,6	49,8	94,7	34	11,2

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau (2024), data diolah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi SSH dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau, (2) mengkaji kontribusi SSH dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengembangan SDM daerah, (3) mengevaluasi peran SSH dalam mendorong efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah, dan (4) mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi SSH untuk pengembangan SDM daerah yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian tentang penerapan instrumen pengelolaan keuangan daerah, khususnya SSH, dalam konteks pengembangan SDM daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran SSH sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM.

Tinjauan Pustaka

Standar Satuan Harga (SSH) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan instrumen regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Menurut [Halim dan Kusufi \(2018\)](#), SSH merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang dapat dianggarkan untuk suatu kegiatan atau program. SSH memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi alat pengendalian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran ([Permadi et al., 2019](#)).

Implementasi SSH dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menegaskan pentingnya standar biaya dalam penyusunan anggaran daerah. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah secara spesifik mengatur mekanisme penyusunan dan penerapan SSH di tingkat daerah ([Ermawijaya, 2021](#)).

Karakteristik utama SSH adalah sifatnya yang bersifat dinamis dan perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga pasar. Hal ini sejalan dengan temuan [Utomo et al. \(2018\)](#) yang mengidentifikasi bahwa efektivitas SSH bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan memperbarui standar harga sesuai dengan kondisi pasar terkini. Lebih lanjut, [Damayanti & Destiningsih \(2020\)](#) menemukan

bahwa SSH yang disusun berdasarkan survei harga pasar yang komprehensif cenderung lebih akurat dan dapat diterima oleh pengguna anggaran.

Dalam implementasinya, SSH tidak hanya mencakup harga barang, tetapi juga jasa dan honorarium. [Hendriyadi dkk. \(2020\)](#) membagi SSH menjadi tiga kategori utama: (1) standar biaya umum, yang berlaku untuk semua OPD; (2) standar biaya khusus, yang berlaku untuk OPD tertentu; dan (3) standar biaya masukan, yang menjadi acuan dalam penghitungan kebutuhan anggaran. Pembagian ini penting untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran yang bervariasi antar OPD.

Kontribusi SSH dalam pengelolaan keuangan daerah telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. [Nurohmayni Putri \(2024\)](#) mengidentifikasi bahwa penerapan SSH di Pemerintah Kota Bandar Lampung mampu mengurangi disparitas harga antar OPD hingga 25%. Sementara itu, [Erliyani & Sulastiningsih \(2023\)](#) menemukan bahwa implementasi SSH yang konsisten berkontribusi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Magelang.

Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah

Akuntabilitas anggaran merupakan konsep kunci dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ([Binawati & Badriyah, 2022](#)).

Dimensi akuntabilitas anggaran mencakup beberapa aspek penting. [Tulungen & Adrison \(2021\)](#) mengidentifikasi empat dimensi akuntabilitas anggaran pemerintah daerah yaitu: (1) akuntabilitas hukum dan peraturan, (2) akuntabilitas proses, (3) akuntabilitas program, dan (4) akuntabilitas keuangan. Keempat dimensi tersebut saling terkait dan membentuk sistem akuntabilitas yang komprehensif. Perspektif ini diperkuat oleh [Erawati \(2020\)](#) yang menekankan pentingnya integrasi berbagai dimensi akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Sejalan dengan konsep akuntabilitas, efisiensi anggaran menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi mengacu pada pencapaian output maksimal dengan input minimal atau pencapaian output tertentu dengan input minimal. Dalam konteks anggaran pemerintah daerah, efisiensi menekankan pada penggunaan anggaran secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan ([Almuttaqin dkk., 2021](#)).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi anggaran pemerintah daerah telah dikaji oleh beberapa peneliti. [Khairudin & Erlanda \(2016\)](#) mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi efisiensi anggaran, yakni: (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kompetensi pengelola keuangan, (3) sistem pengendalian internal, dan (4) penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, [Nursaefullah \(2021\)](#) menemukan bahwa implementasi standar biaya dalam perencanaan anggaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi anggaran daerah.

Hubungan antara akuntabilitas dan efisiensi anggaran telah dikaji oleh beberapa peneliti. [Riyanto \(2022\)](#) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dan efisiensi anggaran, dimana peningkatan akuntabilitas cenderung diikuti dengan peningkatan

efisiensi. Hal ini diperkuat oleh temuan [Haris \(2017\)](#) yang mengidentifikasi bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran hingga 18,5% di Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dalam konteks penerapan instrumen pengelolaan keuangan daerah, SSH memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. [Mayani dkk. \(2018\)](#) menemukan bahwa penerapan SSH secara konsisten berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas proses dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Pulau Selayar. Sementara itu, [Dai dkk. \(2023\)](#) mengidentifikasi bahwa implementasi SSH mampu meningkatkan efisiensi anggaran belanja barang dan jasa di Pemerintah Kota Gorontalo.

Pengembangan SDM Daerah dan Anggaran

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. [Simarmata dkk. \(2020\)](#) mendefinisikan pengembangan SDM daerah sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Pengembangan SDM daerah mencakup berbagai program dan kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

Regulasi terkait pengembangan SDM daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN, yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan secara spesifik mengatur pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam perspektif anggaran, pengembangan SDM daerah membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. [Saipan dkk. \(2024\)](#) mengidentifikasi bahwa anggaran pengembangan SDM di pemerintah daerah rata-rata mencapai 5-8% dari total anggaran belanja daerah. Besarnya anggaran ini menjadikan program pengembangan SDM sebagai salah satu pos belanja yang perlu dikelola secara optimal untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensinya.

Karakteristik anggaran pengembangan SDM daerah ditandai dengan kompleksitas dan variasinya. [Sayuti dkk. \(2018\)](#) mengidentifikasi empat kategori utama anggaran pengembangan SDM daerah, yakni: (1) anggaran pendidikan dan pelatihan formal, (2) anggaran bimbingan teknis dan workshop, (3) anggaran seminar dan konferensi, dan (4) anggaran pengembangan kompetensi lainnya. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan kebutuhan anggaran yang berbeda, sehingga membutuhkan pengelolaan yang spesifik.

Tantangan dalam pengelolaan anggaran pengembangan SDM daerah telah dikaji oleh beberapa peneliti. [Kamala dkk. \(2025\)](#) mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam pengelolaan anggaran pengembangan SDM, yakni: (1) kesulitan dalam standarisasi biaya, (2) keterbatasan data dukung dalam perencanaan anggaran, dan (3) lemahnya koordinasi antar OPD. Sementara itu, [Toni \(2024\)](#) menemukan bahwa disparitas harga untuk jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang sama antar OPD menjadi indikator inefisiensi anggaran pengembangan SDM.

Penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. [Yuliyanto dkk. \(2022\)](#) mengusulkan model

penilaian efektivitas anggaran pengembangan SDM berdasarkan empat indikator: (1) relevansi program dengan kebutuhan kompetensi, (2) pencapaian tujuan program, (3) keberlanjutan dampak program, dan (4) efisiensi penggunaan anggaran. Model ini menekankan pentingnya keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan peningkatan kompetensi yang dihasilkan.

Dalam konteks implementasi SSH, anggaran pengembangan SDM memiliki karakteristik yang membutuhkan pendekatan khusus. Dimana penerapan SSH untuk kegiatan pengembangan kompetensi membutuhkan fleksibilitas tertentu untuk mengakomodasi variasi kebutuhan pengembangan kompetensi antar OPD. Sementara itu mengidentifikasi bahwa integrasi SSH dengan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena atau kasus spesifik dalam konteks alamiahnya (Braun & Clarke, 2019). Desain studi kasus eksplanatori digunakan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat dan memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi (Wenger, 1991). Dalam konteks penelitian ini, desain tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana SSH berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretivisme, yang menekankan pada pemahaman makna subjektif yang diberikan oleh para aktor terhadap suatu fenomena (Djamba & Neuman, 2002). Paradigma ini relevan dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami bagaimana para pengelola keuangan dan pengembangan SDM di Pemerintah Kabupaten Berau memaknai dan mengimplementasikan SSH dalam konteks anggaran pengembangan SDM.

Fokus penelitian adalah pada implementasi SSH dalam konteks anggaran pengembangan SDM di Pemerintah Kabupaten Berau periode 2019-2023. Rentang waktu ini dipilih untuk memungkinkan analisis tren dan perubahan setelah implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Berau yang kemudian diperbarui secara berkala.

Sampel dan Partisipan Penelitian

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Kriteria pemilihan partisipan meliputi: (1) keterlibatan langsung dalam penyusunan atau implementasi SSH, (2) keterlibatan dalam pengelolaan anggaran pengembangan SDM, dan (3) pemahaman yang komprehensif terhadap konteks pengembangan SDM di Kabupaten Berau.

Berdasarkan kriteria tersebut, partisipan penelitian terdiri dari 27 informan yang dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. Kelompok Penyusun SSH, terdiri dari 7 informan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau, meliputi Kepala BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, dan 4 staf perencanaan anggaran.

2. Kelompok Pengelola Pengembangan SDM, terdiri dari 8 informan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Berau, meliputi Kepala BKPSDM, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kepala Sub Bidang Diklat, dan 5 staf perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi.
3. Kelompok Pengguna Anggaran, terdiri dari 12 informan dari 6 OPD terpilih (masing-masing 2 informan), yang meliputi Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD. Keenam OPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektorat Daerah.

Jumlah partisipan tersebut dianggap memadai karena telah mencapai saturasi data, yaitu kondisi dimana penambahan partisipan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan (Sugiyono, 2022).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) Wawancara mendalam dilakukan dengan seluruh partisipan penelitian menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian dan disesuaikan dengan kategori partisipan. Durasi wawancara berkisar antara 60-90 menit untuk setiap partisipan. Seluruh wawancara direkam (dengan persetujuan partisipan) dan ditranskripsikan untuk analisis. Wawancara dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024 di lokasi yang disepakati dengan partisipan.
2. Observasi Partisipatif Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti proses penyusunan anggaran pengembangan SDM di 3 OPD terpilih (Sekretariat Daerah, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan) dan proses pembahasan anggaran di BPKAD. Observasi dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024, dengan total 12 sesi observasi (masing-masing 3-4 jam). Selama observasi, peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat informasi penting terkait penggunaan SSH dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran.
3. Analisis Dokumen Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen berikut:
 - o Peraturan Bupati Berau tentang SSH tahun 2018-2023
 - o Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait program pengembangan SDM dari 6 OPD terpilih tahun 2019-2023
 - o Laporan realisasi anggaran program pengembangan SDM tahun 2019-2023
 - o Dokumen perencanaan dan evaluasi program pengembangan SDM
 - o Dokumen hasil audit BPK dan Inspektorat terkait anggaran pengembangan SDM

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2019), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Familiarisasi dengan Data Peneliti membaca secara berulang transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap data.
2. Pengkodean Awal Peneliti melakukan pengkodean terhadap informasi penting dalam data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengkodean dilakukan secara

manual dengan bantuan software NVivo 12 untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian data.

3. Identifikasi Tema Potensial Kode-kode yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema potensial berdasarkan kesamaan pola dan makna.
4. Peninjauan Tema Tema-tema potensial ditinjau kembali untuk memastikan koherensi internal dan keunikan eksternal. Tema yang tumpang tindih atau tidak memiliki dukungan data yang cukup direvisi atau dihilangkan.
5. Definisi dan Penamaan Tema Tema-tema yang telah difinalisasi kemudian didefinisikan secara jelas dan diberi nama yang representatif.
6. Penulisan Hasil Analisis Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi yang didukung dengan kutipan langsung dari wawancara dan dokumen untuk memperkuat argumentasi.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil analisis, peneliti menggunakan beberapa teknik validasi, antara lain:

1. *Member Checking* Hasil interpretasi awal dikonfirmasi kepada partisipan kunci untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan perspektif mereka.
2. *Peer Debriefing* Peneliti melibatkan rekan sejawat yang tidak terlibat dalam penelitian untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap proses dan hasil analisis.
3. *Audit Trail* Peneliti mendokumentasikan secara detail proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan transparansi dan konsistensi penelitian.

Selain analisis tematik, peneliti juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan implementasi SSH antar OPD dan analisis tren untuk mengidentifikasi perubahan dalam implementasi SSH dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan efisiensi anggaran selama periode 2019-2023.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi SSH dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pengembangan SDM

Implementasi SSH dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Berau, implementasi SSH merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan standarisasi biaya dalam penyusunan anggaran:

“SSH menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseragaman harga dalam penyusunan anggaran daerah. Kami melihat bahwa sebelum adanya SSH, terjadi variasi harga yang signifikan untuk jenis barang dan jasa yang sama antar OPD, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.” (Wawancara, Kepala BPKAD, 25 November 2023)

Proses penyusunan SSH di Kabupaten Berau melibatkan beberapa tahapan, yakni: (1) pengumpulan data harga pasar melalui survei, (2) verifikasi dan validasi data oleh tim teknis, (3) pembahasan dengan OPD terkait, (4) finalisasi rancangan SSH, dan (5) penetapan SSH melalui Peraturan Bupati. Proses ini dilakukan secara berkala, dengan pembaruan SSH setiap tahun untuk mengakomodasi perubahan harga pasar.

Dalam konteks anggaran pengembangan SDM, SSH mencakup beberapa komponen biaya, antara lain: (1) honorarium narasumber, (2) akomodasi dan konsumsi peserta, (3) bahan dan alat penunjang, (4) sewa tempat dan peralatan, dan (5) perjalanan dinas terkait kegiatan pengembangan kompetensi. Komponen biaya ini menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk program pengembangan SDM.

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi SSH dalam anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau mengalami peningkatan kepatuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan OPD terhadap SSH dalam anggaran pengembangan SDM mencapai 76,2%, dan meningkat menjadi 92,8% pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya BPKAD dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada OPD, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD:

“Kami melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada OPD dalam implementasi SSH. Pada tahun-tahun awal implementasi, kami menemukan banyak kesalahan dalam penerapan SSH, namun seiring waktu, pemahaman OPD semakin baik dan tingkat kepatuhan meningkat signifikan.” (Wawancara, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, 2 Desember 2023)

Meskipun demikian, implementasi SSH dalam anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau menghadapi beberapa tantangan. Hasil wawancara dengan pengguna anggaran mengungkapkan tiga tantangan utama, yakni: (1) kebutuhan penyesuaian SSH dengan karakteristik kegiatan pengembangan kompetensi yang spesifik, (2) fluktuasi harga pasar yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh SSH yang ditetapkan setahun sekali, dan (3) keterbatasan pemahaman sebagian pengelola keuangan OPD terhadap teknis penerapan SSH.

Tantangan pertama terkait kebutuhan penyesuaian SSH dengan karakteristik kegiatan pengembangan kompetensi yang spesifik, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM:

“Kegiatan pengembangan kompetensi memiliki variasi yang cukup banyak, mulai dari diklat struktural, diklat teknis, bimtek, workshop, hingga coaching dan mentoring. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda, sedangkan SSH cenderung menyeragamkan komponen biaya. Ini menjadi tantangan bagi kami dalam menyusun anggaran yang tepat.” (Wawancara, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM, 10 Desember 2023)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan mekanisme pengecualian (*exemption*) yang memungkinkan OPD mengajukan penyesuaian SSH untuk kegiatan-kegiatan spesifik dengan justifikasi yang kuat. Mekanisme ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi SSH tanpa mengurangi prinsip standardisasi biaya.

Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi SSH telah berkontribusi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran pengembangan SDM. Dokumen RKA yang disusun berdasarkan SSH cenderung lebih terstruktur, detail, dan memiliki justifikasi anggaran yang lebih kuat. Hal ini mendukung temuan dari [Dai dkk. \(2023\)](#) yang mengidentifikasi bahwa implementasi SSH yang konsisten berkontribusi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran.

Berdasarkan hasil triangulasi data, implementasi SSH dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau menunjukkan tren positif, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Peningkatan kepatuhan terhadap SSH dan pengembangan mekanisme pengecualian untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SSH.

Kontribusi SSH dalam Meningkatkan Akuntabilitas Anggaran Pengembangan SDM

Penerapan SSH memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil analisis data, kontribusi SSH terhadap akuntabilitas anggaran dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: (1) standarisasi

biaya dan transparansi anggaran, (2) kemudahan dalam pelacakan dan audit anggaran, dan (3) penguatan justifikasi dalam perencanaan anggaran.

Aspek pertama, standardisasi biaya dan transparansi anggaran, merupakan kontribusi utama SSH dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya SSH, komponen biaya untuk kegiatan pengembangan SDM menjadi lebih terstandar dan transparan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Berau:

"SSH memberikan manfaat besar bagi kami sebagai auditor internal. Adanya standar yang jelas membuat proses audit menjadi lebih mudah karena kami memiliki acuan yang sama dalam menilai kewajaran anggaran. SSH juga mendorong transparansi karena semua OPD menggunakan standar yang sama dan dapat diakses oleh publik." (Wawancara, Kepala Inspektorat Daerah, 18 Desember 2023)

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa sejak implementasi SSH, terjadi penurunan temuan audit terkait kewajaran harga dalam anggaran pengembangan SDM. Pada tahun 2019, terdapat 17 temuan audit terkait kewajaran harga dalam anggaran pengembangan SDM, dan menurun menjadi hanya 4 temuan pada tahun 2023. Penurunan temuan audit ini mengindikasikan peningkatan akuntabilitas anggaran yang difasilitasi oleh implementasi SSH.

Aspek kedua, kemudahan dalam pelacakan dan audit anggaran, juga menjadi kontribusi penting SSH dalam meningkatkan akuntabilitas. Standardisasi komponen biaya memudahkan pelacakan dan audit anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Kasubid Pemeriksaan BPKAD:

"Dengan adanya SSH, kami lebih mudah melakukan pelacakan dan verifikasi anggaran. Setiap komponen biaya dalam anggaran pengembangan SDM dapat ditelusuri kewajaran dan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Ini memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung akuntabilitas anggaran." (Wawancara, Kasubid Pemeriksaan BPKAD, 5 Januari 2024)

Kemudahan dalam pelacakan dan audit anggaran ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas proses, sebagaimana dikemukakan oleh [Somad et al. \(2023\)](#) yang mengidentifikasi akuntabilitas proses sebagai salah satu dimensi penting dalam akuntabilitas anggaran pemerintah daerah.

Aspek ketiga, penguatan justifikasi dalam perencanaan anggaran, juga menjadi kontribusi SSH dalam meningkatkan akuntabilitas. Implementasi SSH mendorong OPD untuk menyusun justifikasi yang lebih kuat dalam perencanaan anggaran pengembangan SDM, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

"SSH menuntut kami untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran. Setiap komponen biaya harus memiliki justifikasi yang kuat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mendorong kami untuk menyusun dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan akuntabel." (Wawancara, Kepala Dinas Pendidikan, 12 Januari 2024)

Penguatan justifikasi dalam perencanaan anggaran ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan, yang merupakan dimensi penting dalam akuntabilitas anggaran pemerintah daerah ([Somad et al., 2023](#)).

Meskipun demikian, kontribusi SSH dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Hasil wawancara dengan pengguna anggaran mengungkapkan dua tantangan utama, yakni: (1) kurangnya fleksibilitas SSH untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi

yang spesifik, dan (2) keterbatasan kapasitas SDM pengelola keuangan OPD dalam mengimplementasikan SSH secara tepat.

"Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan beberapa strategi, antara lain: (1) pengembangan SSH yang lebih rinci untuk komponen biaya pengembangan SDM, (2) pengembangan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan akses dan implementasi SSH, dan (3) penguatan kapasitas pengelola keuangan OPD melalui pelatihan dan pendampingan intensif." (Wawancara, Kepala BPKAD, 25 November 2023)

Berdasarkan triangulasi data, implementasi SSH telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Almuttaqin dkk. \(2021\)](#) yang mengidentifikasi bahwa penerapan SSH secara konsisten berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas proses dan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah.

Peran SSH dalam Mendorong Efisiensi Anggaran Pengembangan SDM

Implementasi SSH memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong efisiensi anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil analisis data, peran SSH dalam mendorong efisiensi anggaran dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: (1) pencegahan mark-up anggaran, (2) optimalisasi alokasi anggaran, dan (3) penghematan anggaran secara keseluruhan.

Aspek pertama, pencegahan mark-up anggaran, merupakan kontribusi utama SSH dalam mendorong efisiensi. Dengan adanya standar harga yang jelas, potensi mark-up anggaran dapat diminimalisir, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BPKAD:

"Sebelum implementasi SSH, kami sering menemukan variasi harga yang signifikan untuk jenis kegiatan yang sama antar OPD. Beberapa anggaran bahkan menunjukkan indikasi mark-up yang cukup tinggi. Dengan adanya SSH, potensi mark-up dapat diminimalisir karena setiap komponen biaya memiliki standar yang jelas dan terukur." (Wawancara, Kepala BPKAD, 25 November 2023)

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa disparitas harga untuk komponen biaya yang sama dalam anggaran pengembangan SDM antar OPD mengalami penurunan signifikan setelah implementasi SSH. Pada tahun 2019, disparitas harga mencapai 27,3%, dan menurun menjadi 11,2% pada tahun 2023. Penurunan disparitas harga ini mengindikasikan peningkatan efisiensi anggaran melalui pencegahan mark-up.

Aspek kedua, optimalisasi alokasi anggaran, juga menjadi kontribusi penting SSH dalam mendorong efisiensi. Standardisasi biaya mendorong OPD untuk mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM:

"SSH mendorong kami untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran. Dengan adanya standar yang jelas, kami dapat menyusun anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil pengembangan kompetensi. Ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mencapai output yang lebih baik." (Wawancara, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM, 10 Desember 2023)

Optimalisasi alokasi anggaran ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi teknis, yang merupakan salah satu dimensi penting dalam efisiensi anggaran pemerintah daerah ([Putri, 2015](#)).

Aspek ketiga, penghematan anggaran secara keseluruhan, menjadi indikator konkret peran SSH dalam mendorong efisiensi. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi SSH berkontribusi pada penghematan anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau. Pada tahun 2019, anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau mencapai Rp42,7 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp52,6 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan proyeksi anggaran tanpa implementasi SSH (berdasarkan tren sebelum implementasi SSH), terdapat penghematan sekitar Rp11,8 miliar atau 18,3%.

Secara lebih spesifik, penghematan anggaran dapat dilihat pada dua jenis kegiatan pengembangan SDM, yakni program pengembangan kompetensi umum dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pada program pengembangan kompetensi umum, implementasi SSH berkontribusi pada penghematan anggaran sebesar 17,3%, sedangkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, penghematan mencapai 22,1%. Penghematan ini terutama berasal dari standarisasi biaya honorarium narasumber, akomodasi dan konsumsi peserta, serta perjalanan dinas.

Meskipun implementasi SSH berkontribusi pada penghematan anggaran, hal ini tidak mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan pengembangan SDM. Justru, dengan adanya efisiensi anggaran, alokasi dana dapat dioptimalkan untuk menjangkau lebih banyak pegawai. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Diklat BKPSDM:

“Implementasi SSH justru memungkinkan kami untuk melaksanakan lebih banyak kegiatan pengembangan kompetensi dengan anggaran yang ada. Efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas kegiatan, tetapi mendorong kami untuk mengoptimalkan setiap rupiah untuk pengembangan kompetensi ASN.” (Wawancara, Kepala Sub Bidang Diklat BKPSDM, 15 Desember 2023)

Temuan ini sejalan dengan konsep efisiensi yang dikemukakan oleh Putri (2015), yang menekankan pencapaian output maksimal dengan input minimal atau pencapaian output tertentu dengan input minimal.

Peran SSH dalam mendorong efisiensi anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau juga dapat dilihat dari aspek penggunaan teknologi informasi. Implementasi SSH didukung oleh pengembangan sistem informasi berbasis web yang memudahkan OPD dalam mengakses dan mengimplementasikan SSH. Hal ini sejalan dengan temuan Putri (2015) yang mengidentifikasi penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi anggaran.

Berdasarkan triangulasi data, implementasi SSH telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong efisiensi anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dai dkk. (2023) yang mengidentifikasi bahwa implementasi SSH mampu meningkatkan efisiensi anggaran belanja barang dan jasa hingga 20,3% di pemerintah daerah.

Tantangan dan Strategi Optimalisasi SSH untuk Pengembangan SDM Daerah

Implementasi SSH untuk pengembangan SDM daerah di Kabupaten Berau menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan hasil analisis data, terdapat empat tantangan utama dalam implementasi SSH untuk pengembangan SDM daerah, yakni: (1) kebutuhan penyesuaian SSH dengan dinamika harga pasar, (2) keterbatasan fleksibilitas SSH untuk kebutuhan spesifik, (3) kapasitas SDM pelaksana, dan (4) integrasi SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran.

Tantangan pertama terkait dengan kebutuhan penyesuaian SSH dengan dinamika harga pasar. SSH yang ditetapkan setahun sekali terkadang tidak dapat mengakomodasi fluktuasi harga pasar yang dinamis, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD:

“Tantangan utama dalam implementasi SSH adalah menyesuaikan standar harga dengan dinamika pasar. Harga barang dan jasa dapat berfluktuasi dalam waktu singkat, sementara SSH ditetapkan setahun sekali. Ini terkadang menimbulkan kesulitan bagi OPD dalam mengimplementasikan SSH.” (Wawancara, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, 2 Desember 2023)

Untuk mengatasi tantangan ini, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan mekanisme revisi SSH melalui Peraturan Bupati jika terjadi perubahan harga yang signifikan. Selain itu, BPKAD juga mengembangkan kebijakan indeksasi harga yang memungkinkan penyesuaian SSH secara otomatis berdasarkan tingkat inflasi atau perubahan harga tertentu.

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan fleksibilitas SSH untuk kebutuhan spesifik, terutama dalam konteks pengembangan SDM daerah. Kegiatan pengembangan SDM memiliki variasi yang cukup beragam dan terkadang membutuhkan alokasi anggaran yang spesifik, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

“Kegiatan pengembangan kompetensi untuk guru dan tenaga kependidikan memiliki karakteristik yang khas dan terkadang membutuhkan alokasi anggaran yang spesifik. SSH yang terlalu kaku dapat menghambat implementasi program pengembangan kompetensi yang inovatif.” (Wawancara, Kepala Dinas Pendidikan, 12 Januari 2024)

Untuk mengatasi tantangan ini, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan mekanisme pengecualian (*exemption*) yang memungkinkan OPD mengajukan penyesuaian SSH untuk kegiatan-kegiatan spesifik dengan justifikasi yang kuat. Selain itu, BPKAD juga mengembangkan SSH yang lebih rinci untuk komponen biaya pengembangan SDM, sehingga dapat mengakomodasi variasi kebutuhan pengembangan kompetensi.

Tantangan ketiga terkait dengan kapasitas SDM pelaksana. Implementasi SSH yang efektif membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari pengelola keuangan OPD, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala PPK Dinas Kesehatan:

“Tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan pemahaman staf terhadap teknis implementasi SSH. SSH memiliki struktur yang cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik untuk mengimplementasikannya secara tepat.” (Wawancara, Kepala PPK Dinas Kesehatan, 8 Januari 2024)

Untuk mengatasi tantangan ini, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan program peningkatan kapasitas pengelola keuangan OPD melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Selain itu, BPKAD juga mengembangkan panduan teknis implementasi SSH yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Tantangan keempat berkaitan dengan integrasi SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Implementasi SSH yang efektif membutuhkan integrasi yang baik dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BPKAD:

“Tantangan lain adalah mengintegrasikan SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ada. SSH perlu menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan penganggaran untuk memastikan efektivitasnya.” (Wawancara, Kepala BPKAD, 25 November 2023)

Untuk mengatasi tantangan ini, BPKAD Kabupaten Berau telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Sistem ini memungkinkan OPD untuk mengakses SSH secara real-time dan mengintegrasikannya langsung dalam proses penyusunan RKA.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan peran SSH dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah, antara lain:

1. Pengembangan Kebijakan SSH yang Adaptif SSH perlu dikembangkan secara lebih adaptif untuk mengakomodasi dinamika harga pasar dan kebutuhan spesifik pengembangan SDM daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme pembaruan SSH yang lebih responsif, kebijakan indeksasi harga, dan mekanisme pengecualian untuk kebutuhan spesifik.
2. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Integrasi SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi. Sistem ini memungkinkan OPD untuk mengakses SSH secara real-time dan mengintegrasikannya langsung dalam proses penyusunan RKA.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Kapasitas aparatur pengelola keuangan dalam mengimplementasikan SSH perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Selain itu, pengembangan panduan teknis implementasi SSH yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga dapat mendukung peningkatan kapasitas aparatur.
4. Pengembangan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif Monitoring dan evaluasi implementasi SSH perlu dilakukan secara komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme umpan balik yang efektif.

Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran SSH dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah di Kabupaten Berau.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran Standar Satuan Harga (SSH) dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SSH memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah. Namun, implementasi SSH juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan perannya.

Pertama, implementasi SSH dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pengembangan SDM di Kabupaten Berau menunjukkan tren positif, dengan peningkatan tingkat kepatuhan OPD dari 76,2% pada tahun 2019 menjadi 92,8% pada tahun 2023. Implementasi SSH telah berkontribusi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran, yang ditandai dengan dokumen RKA yang lebih terstruktur, detail, dan memiliki justifikasi anggaran yang lebih kuat.

Kedua, SSH memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran pengembangan SDM melalui tiga aspek utama, yakni: (1) standardisasi biaya dan transparansi anggaran, (2) kemudahan dalam pelacakan dan audit anggaran, dan (3) penguatan justifikasi dalam perencanaan anggaran. Kontribusi SSH terhadap akuntabilitas ditandai

dengan penurunan temuan audit terkait kewajaran harga dalam anggaran pengembangan SDM, dari 17 temuan pada tahun 2019 menjadi 4 temuan pada tahun 2023.

Ketiga, SSH berkontribusi signifikan dalam mendorong efisiensi anggaran pengembangan SDM melalui tiga aspek utama, yakni: (1) pencegahan mark-up anggaran, (2) optimalisasi alokasi anggaran, dan (3) penghematan anggaran secara keseluruhan. Kontribusi SSH terhadap efisiensi ditandai dengan penurunan disparitas harga antar OPD dari 27,3% pada tahun 2019 menjadi 11,2% pada tahun 2023, serta penghematan anggaran sebesar 18,3% dibandingkan dengan proyeksi anggaran tanpa implementasi SSH.

Keempat, implementasi SSH untuk pengembangan SDM daerah di Kabupaten Berau menghadapi empat tantangan utama, yakni: (1) kebutuhan penyesuaian SSH dengan dinamika harga pasar, (2) keterbatasan fleksibilitas SSH untuk kebutuhan spesifik, (3) kapasitas SDM pelaksana, dan (4) integrasi SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kebijakan SSH yang adaptif, penguatan integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, dan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan peran SSH dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah di Kabupaten Berau, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Berau perlu mengembangkan kebijakan SSH yang lebih adaptif untuk mengakomodasi dinamika harga pasar dan kebutuhan spesifik pengembangan SDM daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme pembaruan SSH yang lebih responsif, kebijakan indeksasi harga, dan mekanisme pengecualian untuk kebutuhan spesifik.
2. BPKAD Kabupaten Berau perlu memperkuat integrasi SSH dengan sistem perencanaan dan penganggaran melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi. Sistem ini memungkinkan OPD untuk mengakses SSH secara *real-time* dan mengintegrasikannya langsung dalam proses penyusunan RKA.
3. Pemerintah Kabupaten Berau perlu meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dalam mengimplementasikan SSH melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Selain itu, pengembangan panduan teknis implementasi SSH yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga dapat mendukung peningkatan kapasitas aparatur.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Berau perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasi SSH dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme umpan balik yang efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (1) fokus penelitian yang terbatas pada konteks Kabupaten Berau, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati, dan (2) rentang waktu penelitian yang terbatas pada periode 2019-2023, sehingga dampak jangka panjang implementasi SSH belum dapat diidentifikasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak daerah dan memperpanjang rentang waktu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran SSH dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran pengembangan SDM daerah.

Daftar Pustaka

- Almuttaqin, A., Kusnadi, N., & Widyastutik, W. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan E-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 147–161. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2106>
- Amanda, R. A., & Henny, D. (2022). ANALISIS PENERAPAN STANDAR HARGA SATUAN PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1629–1640. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14934>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Dai, R. Y., Boku, Z., & Mahmud, M. (2023). Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 236–245.
- Damayanti, H., & Destiningsih, R. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPBD Kabupaten Magelang). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(2), 175–186. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2291>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Erawati, T. (2020). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i1.940>
- Erliyani, E., & Sulastiningsih, S. (2023). Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Aplikasi Sipd terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(4). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4.854>
- Ermawijaya, M. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i2.197>
- Gudipung, H. A., Pati, K., & Rangga, Y. D. P. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka). *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 66–81. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.889>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, R. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 102–111. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1928>
- Hendriyadi, M., Hutadjulu, L., & Bleskadit, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Persepsi Atas Penerimaan Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 15(2), 12–19. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1621>
- Kamala, J., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Tantangan Dan Solusi Dalam Anggaran Belanja Daerah. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(6).
- Khairudin, K., & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/10.36448/jak.v7i2.752>
- Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1509>
- Mayani, N., Falatehan, A. F., & Wahyuni, E. S. (2018). Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22708
- Nurohmayni Putri. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i2.680>
- Nursaefullah. (2021). Analisis Jabatan Pegawai pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 101–111. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i1.196>
- Permadi, H., Siregar, H., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24818
- Putri, A. (2015). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2302>
- Riyanto, W. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Studi Kasus : Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(2), 86–96. <https://doi.org/10.55961/>

jpbj.v1i2.21

- Saipan, H.I., & Dahlan. (2024). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor: Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/ BPKAD Kabupaten Biak Numfor. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1698>
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.54>
- Simarmata, N., Yuniarti, K. W., Riyono, B., & Patria, B. (2020). Gotong Royong in Organization. *International Journal of Social Welfare Promotion and Management*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.21742/IJSWPM.2020.7.2.01>
- Somad, F. H., Naz'aina, N., Khaddafi, M., & Razif, R. (2023). Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan ke 3*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Toni, D. T. (2024). Strategi Pengembangan Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen (JREM)*, 15(4).
- Tulungen, B. T., & Adrison, V. (2021). Kompetisi dan Efisiensi pada Pengadaan Pemerintah: Bukti Empiris pada Kementerian/ Lembaga di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 19–29. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.225>
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Wenger, A. F. Z. (1991). *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd ed.). By Michael Quinn Patton. 532 pp. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990, \$39.95. *Nursing Research*, 40(5), 281. <https://doi.org/10.1097/00006199-199109000-00006>
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>